

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PENYEDIAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU



OLEH:

AMIRUDDIN

B 111 10 003

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PENYEDIAAN
KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU**

OLEH :

AMIRUDDIN

B 111 10 003

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : AMIRUDDIN

Nomor Induk : B 111 10 003

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bulukumba Terhadap Penyediaan Kawasan Ruang
Terbuka Hijau

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 7 Mei 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H.
NIP. 19640824199103 2 002

Pembimbing II



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
NIP. 19811418200212 1 004

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **AMIRUDDIN**

No. Pokok : B111 10 003

Bagian : Hukum Tata Negara

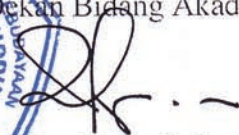
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2014



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PENYEDIAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU

Disusun dan diajukan oleh :

AMIRUDDIN

B111 10 003

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana
Bagian Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, Tanggal 6 Juni 2014
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 19640824199103 2 002

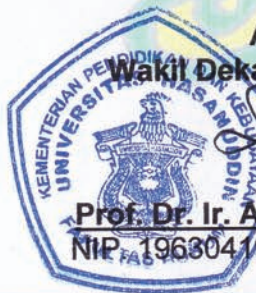
Sekretaris



Dr. Muh. Hasrul. S.H., M.H.
NIP. 19811418200212 1 004

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

AMIRUDDIN B111 10 003, “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PENYEDIAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU”. Bulukumba, Penulisan Hukum (Skripsi), 2014.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba badan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor DPRD dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau yaitu Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berusaha memenuhi criteria proporsi RTH dalam kebijakannya dengan melakukan berbagai program yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan semua unsure terkait termasuk masyarakat. Wujud dari koordinasi penyelenggaraan penataan ruang demi mendapatkan nilai minimal proporsi ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dari total wilayah Kabupaten Bulukumba, yaitu berupa perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian ruang terbuka hijau. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kerjasama baik dari Pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta, dan bersama organisasi non pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau yaitu: 1. Perbedaan Nilai-Nilai yang Dianut Tentang Pemanfaatan Ruang Antara Pemerintah dan Masyarakat; 2. Pembebasan Lahan; 3. Tingkat Pemeliharaan dan Pengawasan Yang Masih Kurang; 4. Peran Serta Masyarakat yang Masih Kurang; 5. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana.

ABSTRACT

AMIRUDDIN (B111 10 003), “*The Implementation of Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 about Space Arrangement Plan in Kabupaten Bulukumba to Supplying The Green Space Area*”. Bulukumba, Law Thesis, 2014th.

This research aimed to know about The Implementation of Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 about Space Arrangement Plan in Kabupaten Bulukumba to Supplying The Green Space Area were did by the government of Kabupaten Bulukumba and the factors that influence in the implementation of Peraturan Daerah.

This research constitute of empirical juridisch law examination descriptively, were did in Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor DPRD and Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

According to the result of the research can be concluded that The Implementation of Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 about Space Arrangement Plan in Kabupaten Bulukumba to Supplying The Area of Green Space is the government have tried to comply the proportion criteria of RTH in the policy by execute many programs that orientation to management of life sphere with all the elements, included the community. The object of coordination space arrangement to obtain minimal value proportion of green space as big as 30 percent from area Kabupaten Bulukumba totally, that is planning, utilization and controlling of green space. It can be formed by cooperation with the government, community, private, and the organization non government.

There are five factors that influence in The Implementation of Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 about Space Arrangement Plan in Kabupaten Bulukumba to Supplying The Area of Green Space. They are :1. The different of values that convinced about space utilization between government and community; 2. Exemption of Area; 3.The less of maintainance and controlling; 4. The less of community contribution; 5. Medium and Infrastructure had limited.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu, yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang senantiasa memberikan petunjuk dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, bantuan moril maupun materil, dukungan, dan semangat yang luar biasa kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini, terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., Bapak Muchsin Salnia, S.H., Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku dosen penguji saat ujian skripsi atas masukan dan saran untuk penulis.
8. Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, petunjuk, solusi, serta motivasi kepada penulis dalam masalah perkuliahan.
9. Segenap Dosen pengajar dan staff pegawai di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Karya Cipta, Dinas Kehutanan, Kantor Lingkungan Hidup, dan

DPRD Kabupaten Bulukumba yang telah membantu penulis dalam memberikan data terkait skripsi ini.

11. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Almarhum Ayahandaku tercinta Abd. Wahab dan ibundaku tercinta Niar, atas seluruh pengorbanannya yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang tetap selalu memberikan dukungan, kepercayaan dan do'a yang luar biasa kepada penulis. Khusus untuk Ayah Semoga engkau tetap tenang di alam sana, dan bahagia melihat anakmu meski dari kejauhan sana. Amin ya Rabb . . .miss you Mom and Dad :'({}
12. Adikku yang tersayang Jumriani (Rika) dan Hasnita (Nita), terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada kakakmu ini, tetaplah menjadi adik yang baik dan penuh tanggungjawab terhadap keluarga.
13. Nenekku tersayang Mintang, yang telah merawat penulis sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih Nek atas semua pengorbanan dan do'amu, nasehatmu, semoga Allah SWT selalu bersamamu.
14. Kawan-kawan satu generasi dan seperjuanganku, Anchu, Rizal, Adi, Andi, Tullah, Suda', Kaddi, Dahyal, Darwis, Anhar, Zul, Farid, Muldi, Appu, Wawan, Imran, Edi, Iyal, Hasdir, dan semua teman-teman IPA 2 SMAN 10 Rilau Ale Angk. 2010, semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu, terima kasih kawan selalu setia dan banyak memberikan warna di kehidupanku. *"keep the friendship forever"*.

15. Teman-teman seperjuanganku di BEM, Surya, Narto, Unchi, Asho, Said, Zikin, Ardi, Inayatullah, Ancha, Aswad, Wawan, Adiyat, Avil, Anto, Alun, Adan, dan K'Jamsir terima kasih kawan atas ilmu dan pengalaman yang kalian bagikan selama penulis menjalani hari-hari perkuliahan. Dan juga semua kawan-kawan seperjuangan angkatan 2010 "LEGITIMASI" terima kasih tetap menjaga loyalitas dan persahabatan kita selamanya.
16. Teman-teman kelas A Fari, Salam, Aat, Imran, Ariel, Arini, Kia, Ziqra, Dewi, Fira, Nini, Tari, Asma, Fitri, pokoknya semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya melewati hari-hari kuliah.
17. Teman-teman di KKMB Unhas, Jabal, Ela, Asda, Randi, Qadri, Jalil, Erwin, Cullank, Alif, Zaldi, dan senior-senior yang lain.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungannya pada penulis hingga terselesaikannya skripsi penelitian ini.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh sekali dari kesempurnaan baik dari segi pembahasan atau materi maupun teknik penyajiannya. Sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, serta kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Hal ini tidak lain dikarenakan masih terbatasnya kemampuan penulis terutama dalam mendeskripsikan

terkait dengan pokok pembahasan serta mengkorelasikan antara variabel-variabel yang menjadi inti permasalahan.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literature, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggungjawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi penulis maupun umumnya kepada orang lain/instansi dan pihak-pihak yang terkait.

Makassar, Mei 2014

Penulis

AMIRUDDIN

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Kegunaan Penelitian | 15 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pemerintahan Daerah | 16 |
| 1. Pengertian..... | 16 |
| 2. Dasar Hukum | 18 |
| 3. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 23 |
| B. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba | 27 |
| 1. Pengertian..... | 27 |
| 2. Materi Muatan Peraturan Daerah | 30 |
| 3. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah No.21 Tahun 2012 | 33 |
| 4. Rencana Pola Tata Ruang | 35 |
| 5. Kewenangan Pemerintah Daerah | 40 |

| | |
|--|----|
| 6. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang..... | 43 |
| 7. Peran Masyarakat Dalam Upaya Penyediaan RTH..... | 45 |
| C. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan..... | 50 |
| 1. Istilah dan Pengertian..... | 51 |
| 2. Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Lingkungan..... | 56 |
| 3. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 58 |
| 4. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 62 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang, Kawasan, Wilayah, dan Daerah | 67 |
| 1. Tata Ruang | 67 |
| 2. Kawasan | 73 |
| 3. Wilayah | 76 |
| 4. Daerah | 76 |
| E. Kawasan Ruang Terbuka Hijau | 77 |
| 1. Pengertian..... | 77 |
| 2. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau | 81 |
| 3. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau..... | 82 |
| 4. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau | 87 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Lokasi Penelitian..... | 90 |
| B. Jenis Dan Sumber Data | 90 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 91 |
| D. Analisis Data | 91 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bulukumba | 93 |
|---|----|

| | |
|--|-----|
| 1. Kecamatan Ujung Bulu | 95 |
| 2. Kecamatan Gantarang..... | 102 |
| B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 | 105 |
| 1. Perbedaan Nilai yang dianut Pemerintah dan Masyarakat .. | 106 |
| 2. Pembebasan Lahan..... | 108 |
| 3. Tingkat Pemeliharaan dan Pengawasan | 109 |
| 4. Peran Serta Masyarakat | 111 |
| 5. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana | 117 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------------|------------|
| A. KESIMPULAN | 118 |
| B. SARAN | 121 |

| | |
|----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 122 |
|----------------------------|------------|

| | |
|-----------------------|--|
| LAMPIRAN | |
|-----------------------|--|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel.1 Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tentang PERDA No.21 Tahun 2012 | 111 |
| Tabel.2 Peran Pemerintah Terhadap Sosialisasi PERDA yang Diberlakukan | 112 |
| Tabel.3 Pendapat Masyarakat Terhadap Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba | 113 |
| Tabel.4 Peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba Terhadap Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau..... | 113 |
| Tabel.5 Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Terhadap Kawasan Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan RTH..... | 114 |
| Tabel.6 Pelibatan Masyarakat Terhadap Pembangunan Kawasan RTH. | 115 |
| Tabel.7 Kesadaran Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tentang Pentingnya Kawasan RTH | 115 |
| Tabel.8 Peran Masyarakat Terhadap Pembangunan Kawasan RTH.. | 116 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak terjadinya reformasi 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia dimulai dari awal. UUD 1945 yang disakralkan oleh Orde Baru, seolah terkikis oleh arus reformasi. Dari tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan, *check and balances*, otonomi daerah, sampai penyelesaian “konflik politik” melalui jalur hukum.

Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin adalah orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu Moh. Yamin mengatakan :¹

“Negeri, Desa dan segala persekutuan adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian Atas dan bagian Bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan urusan Dalam, Pangreh Praja”²

¹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 1.

Seperti halnya Yamin, Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, juga menyampaikan suatu keterangan, yang antara lain mengatakan:

“Tentang Daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu di bawah Pemerintahan Pusat, di bawah Negara tidak ada Negara lagi. Tidak ada *onderstaat*, akan tetapi hanya Daerah. Bentuknya Daerah itu dan bagaimana bentuk Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam undang-undang. Beginilah bunyi pasal 16.”³

Berdasarkan pendapat dari kedua tokoh perancang UUD 1945 tersebut, bahwa Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan dengan keanekaragaman daerah memang membutuhkan pengelolaan dan pengaturan khusus di tingkat daerah. Hal ini kemudian dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 mengenai pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kabupaten.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, hal itu diwujudkan dengan kehadiran UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian lahirlah Undang-undang baru, yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kehadiran Undang-undang tersebut mengisyaratkan mengenai pembangunan suatu daerah dalam suasana yang lebih kondusif dan demokratis.

Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menetapkan peraturan daerah (perda) sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

Peraturan Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, dan merupakan regulasi sebagai bentuk implementasi dari otonomi daerah. Dan dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Peraturan Daerah menjadi kewenangan oleh pejabat pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan DPRD. Dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Paragraf Kedua bagian keempat menyatakan secara jelas bahwa salah satu Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi :

“Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Berdasarkan materi muatan Peraturan Daerah (perda) tersebut selain menampung mengenai kondisi daerah juga merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten khususnya daerah Kabupaten Bulukumba dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah (perda) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba yang disusun dan dibentuk berdasarkan dan mengacu pada penjabaran peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi salah satunya yaitu Peraturan Daerah mengenai Penataan Ruang.

Penataan ruang merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan jika tidak dilaksanakan dengan baik. Pentingnya untuk menciptakan tata ruang kabupaten yang aman, nyaman, efisien dan produktif, serta berkelanjutan, maka masalah penataan ruang kemudian diamanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 dalam pembukaan, yang menyatakan:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.

Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh Negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya kerusakan dalam lingkungan hidup.

Upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, melekat di dalam kewajiban Negara untuk melindungi,

melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Selain itu juga diatur lebih jelas dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang merupakan Undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan hal tersebut, yaitu mengenai urusan pemerintahan yang wajib dan menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota, dalam pasal 13 dan pasal 14 menjelaskan urusan pemerintahan yang wajib salah satu diantaranya mengenai perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

Kewajiban Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh, maka secara tidak langsung pelaksanaan perda tersebut menjadi kewajiban daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka menciptakan suasana lingkungan yang lebih hidup, aman, dan asri. Namun yang menjadi tantangan besar saat ini adalah tingkat kemajuan pembangunan sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi.

Fenomena pemanasan global dan berbagai bencana lingkungan telah mendorong berbagai kabupaten dunia untuk berpikir ulang menata

kehidupan warga dan kabupaten. Perserikatan Bangsa-bangsa memperkirakan lebih dari setengah penduduk dunia telah hidup di kabupaten (2011) dan terus meningkat hingga dua pertiga pada tahun 2050. Amerika Utara dan Selatan adalah wilayah yang paling cepat menuju perkotaan, di mana lebih dari 80 persen penduduk tinggal di kabupaten, diikuti Eropa (70 persen), Asia dan Afrika (40 persen). Rata-rata populasi penduduk kabupaten di Asia 9,4 juta, Amerika Selatan 4,6 juta, Afrika 3,9 juta, Eropa 2,5 juta, dan Amerika Utara 1,4 juta.⁵

Kabupaten-kabupaten di Indonesia kini tengah mengalami degradasi lingkungan menuju penurunan nilai ekologis, akibat pembangunan kabupaten yang lebih menekankan dimensi ekonomi ketimbang dimensi ekologi.⁶

Lingkungan alami dikonversi menjadi lingkungan binaan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekosistem. Pembangunan struktur fisik kabupaten menuju arah maksimal, sedangkan pengembangan struktur alami kabupaten menuju minimal.⁷

Percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Bulukumba saat ini juga telah banyak mengalami kemajuan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak

⁵ Nirwono Joga, *Gerakan Kota Hijau*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. xiii

⁶ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 87.

⁷ *Ibid.*, hlm. 87

pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bulukumba. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bulukumba.

Semakin meningkatnya pembangunan khususnya dibidang infrastruktur seperti gedung, pabrik, dan sarana prasana lain khususnya di kawasan perkotaan Kabupaten Bulukumba juga tidak dapat dipisahkan dari dampak yang kemudian ditimbulkan, terkhusus dampaknya terhadap lingkungan hidup. Fenomena pemanasan global dan berbagai bencana alam dan lingkungan mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, suhu udara semakin panas, gangguan ekologis, dan berdampak secara sosial, politik dan ekonomi di daerah Kabupaten Bulukumba.

Bulukumba merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup besar bila dilihat dari letak geografisnya yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan.

Sepanjang pesisir pantai yang membentang 128 km melintasi 7 kecamatan pada setiap musim barat mengalami gelombang pasang yang sangat berpotensi menimbulkan gelombang pasang yang berakibat abrasi.

Selain itu dataran tinggi serta wilayah pegunungan khususnya yang berada pada lereng Gunung Lompobattang di bagian barat labil dan mudah terjadi longsor, serta sungai besar dan kecil yang melintas di wilayah tersebut, juga menjadi salah satu ancaman bencana yang setiap musim hujan selalu berpotensi menimbulkan banjir di sepanjang aliran sungai.

Bencana angin puting beliung yang senantiasa mengancam pemukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Kahayya beberapa bulan yang lalu, merupakan salah satu bukti bahwa Bulukumba merupakan daerah rawan bencana.⁸

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mencatat sedikitnya lima kecamatan di tahun 2013 lalu tertimpa bencana alam, yaitu Ujungbulu, Gantarang, Ujungloe, Kindang, dan Kajang. Sementara yang luput dari data BPBD adalah puluhan rumah warga di Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumba yang atapnya terbang dihantam angin puting beliung. Beberapa pohon tumbang dan menghalangi akses jalan Desa Sarajoko dan Jojjolo.⁹

Pelaksanaan penataan ruang Kabupaten Bulukumba khususnya terhadap penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan resapan air harus benar-benar dilaksanakan dengan baik,

⁸ <http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/2013/09/bulukumba-rawan-bencana-masyarakat.html> di akses pada tanggal 7 Februari 2014

⁹ <http://www.rca-fn.com/2013/01/lima-kecamatan-di-bulukumba-dilanda.html>. di akses pada tanggal 15 Februari 2014

terkordinir dan berkelanjutan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai penyeimbang ekosistem kabupaten, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kabupaten, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life, human well being*)¹⁰.

Berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan kabupaten yang berkelanjutan (kabupaten hijau) telah dihasilkan, sebut saja Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.¹¹

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mensyaratkan adanya ruang evakuasi bencana sebagai bagian dari RTH kabupaten. Dan lebih jelas lagi dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan kabupaten harus memiliki RTH minimal 30 persen dari total luas kabupaten secara keseluruhan. Ini menegaskan akan pentingnya peranan RTH sebagai infrastruktur hijau dalam tata ruang kabupaten yang berkelanjutan. Perlu adanya pemahaman ulang (redefinisi) RTH dan penempatan kembali (reposisi) RTH dalam struktur dan pola tata ruang kabupaten.¹²

Struktur alami sebagai tulang punggung RTH harus dilihat sebagai asset, potensi, dan investasi kabupaten jangka panjang yang memiliki nilai

¹⁰ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *op.cit*, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 3.

ekologi, sosial, ekonomi, edukatif, evakuasi, dan estetis. Bencana ekologis yang banyak terjadi, seperti banjir, longsor, krisis air tanah, peningkatan suhu di wilayah perkotaan, pemanasan bumi, serta perubahan iklim, pada umumnya diakibatkan oleh dampak pembangunan kabupaten yang kurang mempertimbangkan aspek ekologis.¹³

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diartikan sebagai kawasan yang mempunyai unsur dan struktur alami yang harus diintegrasikan dalam rencana Tata Ruang Kabupaten, Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Regional sebagai satu kesatuan sistem. Pola jaringan RTH dengan berbagai jenis dan fungsinya merupakan rangkaian hubungan dan kesatuan terpadu yang membentuk infrastruktur hijau (*green infrastructure*) atau infrastruktur ekologis (*ecological infrastructure*).¹⁴

Daerah Kabupaten Bulukumba kemudian mewujudkan hal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Seperti halnya amanat pasal 36 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini juga telah di atur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah No. 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba bahwa proporsi penyediaan kawasan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 87

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 87

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dalam hal penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau seyogyanya dapat mencegah dan meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari percepatan pembangunan yang semakin maju yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Maka dari itu untuk mengimbangi dampak tersebut terhadap lingkungan yang telah menjadi objek dari pembangunan infrastruktur maka pelaksanaan Perda tata ruang tersebut harus benar-benar ditegakkan, namun hingga saat ini setelah keberlakuan perda tersebut di akhir tahun 2012 hingga 2013, Kabupaten Bulukumba tetap menjadi langganan dari bencana alam, misalnya banjir, pembangunan drainase dan kawasan resapan air yang tidak memadai.

Landasan yang dijadikan sebagai tulang punggung RTH di wilayah perkotaan adalah faktor air (sungai, danau, situ, waduk, raw-rawa, dan badan air lainnya), hutan, (hutan alami, hutan binaan, seperti hutan kabupaten, hutan rekreasi), lahan-lahan produksi (sawah, kebun, ladang, daerah pertanian lainnya), tepian (tepi pantai laut, tepi danau/situ/telaga), ruang-ruang terbuka akibat perkembangan teknologi (lapangan terbang, ruang-ruang antar bangunan, taman, jalur hijau, dan ruang terbuka lainnya), tuntunan agama, tradisi, maupun budaya (taman makam, alun-alun), dan faktor lain (tempat olahraga, lapangan golf, lapangan latihan militer, dan sebagainya). Oleh karena itu, fungsi dan manfaat RTH sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan akan sangat

berperan dalam pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.¹⁵

Keberadaan RTH di wilayah perkotaan menjadi sangat penting karena dapat menjaga kelangsungan ekosistem perkotaan, seperti mempertahankan siklus hidrologi dan mikroklimat, mereduksi polusi, dan memproduksi oksigen di udara yang bermanfaat untuk kesehatan.

Penataan dan Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan resapan air yang peruntukannya yaitu minimal 30% dari luas wilayah kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dalam aspek penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bulukumba.

Oleh karena itu berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut dalam kaitannya dengan penyediaan kawasan ruang terbuka hijau serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut di kabupaten Bulukumba. Penelitian ini kemudian berjudul ***“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau”***.

¹⁵ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *op.cit*, hlm. 95.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dapat menjamin penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dapat menjamin penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teorits :

- a. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam pengembangan dan pembangunan penataan ruang kawasan ruang terbuka hijau Kabupaten Bulukumba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Bulukumba terhadap pentingnya pengembangan kawasan ruang terbuka hijau di daerah Kabupaten Bulukumba.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi semua pihak yang tertarik dengan kewenangan lembaga terkait dalam menangani penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menghasilkan sebuah rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengambil kebijakan pengembangan penataan ruang khususnya kawasan ruang terbuka hijau Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian

Sejarah pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.

Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Indonesia sebagai negara yang luas, maka diperlukan sub *national government* sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal (daerah) melalui berbagai bentuk pendekatan.

Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit pemerintahan yang sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam menyediakan pelayanan publik di daerah. Pendekatan desentralisasi

memprioritaskan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi perencanaan yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan pusat dalam pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian mengenai pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pengertian pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara RI. Di samping itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.¹⁶

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi :¹⁷

a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;

¹⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

- b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemerintahan desa.

Sedangkan menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Dari pengertian tersebut menurut penulis bahwa pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintahan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

2. Dasar Hukum

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

¹⁸ Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 20.

Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.¹⁹

Secara substansial Undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif Undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris Undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang sebelumnya, kedudukan kepala daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan yang lebih besar daripada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana kekuasaan legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala daerah tidak bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPRD,

¹⁹ Siswanto Sunarno, *op.cit.*, hlm. 54.

dan dalam pelaksanaan tugasnya hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban.

Problematika dalam sistem pemerintahan daerah sebelum adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memang telah menjadi polemik yang kemudian membuat sistem ketatanegaraan Indonesia sering mengalami perubahan.

Permasalahan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kemudian dinilai menjadi hal yang sangat substansial dalam setiap perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah.

Selama berlangsung pemerintahan Orde Baru, Daerah tidak dapat berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistik. Segala kebijakan tentang Daerah selalu diputuskan oleh Pusat.

Sebelum berlakunya Undang-undang baru tentang pemerintah daerah, secara politis, daerah tidak pernah diberi ruang “kebebasan” untuk menentukan masa depan daerahnya sesuai corak, langgam, dan dinamika yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Kepala daerah yang juga sekaligus sebagai kepala wilayah dijadikan alat pusat yang efektif untuk “melegalkan” kebijakan pusat. DPRD yang menjadi bagian dari pemerintah daerah tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan demokrasi di daerah. UU No. 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah telah membuatnya “lumpuh dan mati suri” selama kurang lebih 24 tahun.²⁰

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah berlaku sebagai pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada prinsipnya substansi yang diuraikan dalam UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maupun dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak mengalami perubahan yang berarti.²¹

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara garis besar membahas bagian-bagian kewenangan/kekuasaan dari pusat dan daerah sedangkan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber pendapatan/keuangan. Oleh karena itu kedua Undang-undang tersebut (yang sering disebut UU Otonomi Daerah 1999) mengisyaratkan bahwa setiap Pemerintah Daerah

²⁰ Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 46.

²¹ Robert J. Kodoatie, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 41.

terutama Kabupaten/Kota dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya. Dan saat ini Undang-undang tersebut telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²²

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi menggunakan format otonomi seluas-luasnya. Artinya, asas ini diberlakukan oleh pemerintah seperti pada era sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertimbangan ini didasarkan suatu asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan ekonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.²³

Otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004

²² *Ibid.*, hlm. 41.

²³ Siswanto Sunarno, *op.cit.*, hlm. 108.

tentang Pemerintahan Daerah lebih berorientasi kepada masyarakat daerah (lebih bersifat kerakyatan) daripada pemerintah daerah, artinya kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi daerah memberikan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerah, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

3. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 menegaskan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam rangka

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintahan Desa.²⁴

Sedangkan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi :²⁵

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

²⁴ Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 96.

²⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai urusan wajib yang kemudian menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah dilaksanakan dengan pendekatan sistem otonomi yang meliputi sistem desentralisasi, sistem dekonsentrasi, dan sistem tugas pembantuan. Hubungan antarfungsi pemerintahan ini tidak saling membawahi dan terikat pada hubungan koordinatif administratif.

Kontrol pusat atas daerah dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang kelihatannya menunjukkan formulasi cukup ketat dengan mekanisme pengawasan preventif, represif, dan pengawasan umum. Peran pusat cukup dominan dalam menentukan sah atau tidaknya peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah dan DPRD.²⁶

Sehingga dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, selain menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi juga menjadi urusan wajib bagi pemerintahan daerah tingkat kabupaten /kota dalam menghadapi percepatan pembangunan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai landasan yuridisnya.

B. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba

1. Pengertian

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan

²⁶ Siswanto Sunarno, *op.cit.*, hlm. 109.

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.²⁷

Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota merupakan peraturan yang menjadi keharusan bagi setiap pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam rangka penataan ruang khususnya di wilayah kabupaten yang berorientasi terhadap pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini DPRD bersama dengan Bupati Kabupaten Bulukumba. Sebelum berlakunya peraturan daerah ini, terdapat Peraturan Daerah tentang penataan ruang Kabupaten Bulukumba yang mengatur penataan ruang pada tingkat kecamatan.

Sebagaimana Permen PU No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, bahwa dalam Perda RTRW harus memuat Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yaitu : Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah

²⁷ BAB I Permen PU No. 16 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kabupaten; Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten; Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba juga memuat hal tersebut. Sehingga secara yuridis bahwa Peraturan Daerah tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permen PU No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman RTRW Kabupaten.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat dua pengertian tentang Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam hal ini Peraturan

Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bulukumba bersama dengan Bupati Bulukumba.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah harus didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah

dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tidak boleh menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, otonomi daerah tidak boleh meretak-retakkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebaliknya pemerintah pusat tidak boleh membatasi, apalagi menegasi kewenangan otonomi daerah. Peraturan daerah tidak boleh memuat hal urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti halnya:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama

Dalam peraturan daerah mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Peraturan daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:²⁸

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Adapun materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

²⁸ Pasal 137-138 ayat (1) UU. Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

“Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Sehingga dalam hal ini materi muatan dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, berkaitan dengan penataan ruang. Baik dari aspek perencanaan, peruntukkan, pengelolaan, dan pelestarian dari Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.

Peraturan Daerah ini juga memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam penataan ruang, hak, peran dan kewajiban masyarakat, ketentuan perizinan dan peruntukan, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan, serta ketentuan mengenai pengenaan sanksi dan ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah ini.

3. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba

Secara garis besar, landasan dalam peraturan perundang-undangan di bedakan menjadi :²⁹

a) Landasan Filosofis

Merupakan pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan dalam suatu

²⁹ <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/01/tata-perundang-undangan-hukum-di-indonesia-556346.html> diakses pada tanggal 4 Februari 2014

rencana draf peraturan Negara. Jadi kaidah hukum yang di bentuk harus mencerminkan falsafah hidup bangsa itu, sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.

b) Landasan yuridis

Adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Jadi peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi derajatnya.

c) Landasan sosiologis

Yaitu suatu landasan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami masyarakat dan sesuai dengan kenyataan hidup, jadi ketentuan-ketentuannya harus sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai norma hukum yang tertuang dalam Undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan baik di masyarakat.

d) Landasan politis

Adalah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah Negara. Jadi merupakan kebijakan

nasional sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan ditempuh selama pemerintahannya kedepan.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba juga dibentuk tidak terlepas dari landasan tersebut di atas. Oleh karena itu peraturan ini untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Peraturan Daerah ini juga berlandaskan pada terwujudnya keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Sehingga RTRW ini merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha di Kabupaten Bulukumba, khususnya dalam penyediaan kawasan ruang terbuka hijau.

4. Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bulukumba didasarkan pada rencana pemanfaatan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.³⁰

1. Kawasan lindung Kabupaten Bulukumba terdiri dari :³¹

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah dan memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yang ditetapkan di wilayah Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kajang.
- b. Kawasan perlindungan setempat, yang terdiri dari ; kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Kajang.
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi; kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

³¹ Pasal 28-36 Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba

sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan luasan 30 hektar, Kecamatan Ujungbulu 50 hektar, Kecamatan Ujung Loe 170 hektar, Kecamatan Bontobahari 5 hektar, Kecamatan Bontotiro 25 hektar, Kecamatan Herlang 100 hektar, dan Kecamatan Kajang 100 hektar. Kawasan taman hutan raya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 3.475 hektar, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di :

- Kawasan Puncak Pua Janggo di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Makam Datu Di Tiro di Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Makam Karaeng Ambibia di Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Makam Karaeng Sapohatu di Kecamatan Bontotiro.
- d. Kawasan rawan bencana alam, meliputi; kawasan rawan banjir yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.
- e. Kawasan lindung geologi, meliputi; kawasan cagar alam geologi yang merupakan kawasan keunikan batuan dan fosil yang ditetapkan di sebagian wilayah Bontobahari, Kecamatan

Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kindang, dan Kecamatan Rilau Ale. Kawasan rawan bencana alam seperti tsunami ditetapkan di sebagian wilayah pesisir Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, dan Kecamatan Bontotiro. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah merupakan kawasan imbuhan air tanah yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Gantarang, dan Kecamatan Bulukumpa.

- f. Kawasan lindung lainnya, merupakan kawasan konservasi laut dengan luasan 733 hektar ditetapkan di wilayah Kecamatan Bontobahari.

2. Kawasan Budidaya Kabupaten Bulukumba terdiri dari :³²

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya

³² Pasal 37- 48 Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba, juga ditetapkan kawasan strategis Kabupaten Bulukumba. Kawasan strategis Kabupaten Bulukumba merupakan bagian wilayah Kabupaten Bulukumba yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Terdiri dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, merupakan Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang. Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang.

5. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bulukumba

Pada tahun 2012 konsep Kota Hijau oleh Kementrian Pekerjaan Umum telah dicetuskan untuk mengembangkan ruas-ruas Ruang Terbuka Hijau dalam perkotaan dalam rangka meningkatkan

upaya pelestarian lingkungan yang berfungsi ekologis dalam menanggulangi permasalahan lingkungan dan udara di kabupaten/kota. Hal ini kemudian menginspirasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program *Go Green*, dan kemudian dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan merupakan bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan kota hijau sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan memuat tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTHKP) yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang terbuka hijau. RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Namun, hingga saat ini Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTR) masih dalam proses pembahasan oleh pemerintah kabupaten dan belum diusulkan ke DPRD Kabupaten Bulukumba untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. RDTR lebih spesifik mengatur mengenai ruang terbuka hijau, penataan ruang terbuka hijau pada tiap kecamatan baik RTHKP Publik maupun RTHKP Privat.

Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan mengartikan RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaannya dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/kota. Sedangkan RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, bahwa instansi pelaksana dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri atas pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu Bupati, DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yakni dinas-dinas yang kemudian mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam kordinasi penataan ruang di daerah Kabupaten Bulukumba dan masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terhadap Penataan Ruang khususnya terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten

Bulukumba yaitu terkait dalam hal penentuan kawasan/zonasi, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian kawasan ruang terbuka hijau.

Penentuan kawasan/zonasi berpedoman pada rencana strategis penataan ruang Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan, sektor pariwisata, sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, strategi perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian ekonomi, dan strategi pengembangan dan peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan.

Penentuan Kawasan/Zonasi tersebut tertuang dalam pasal 28 Perda No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian kawasan ruang terbuka hijau berpedoman pada rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulukumba. Bentuk perencanaan dan pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk program pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan ruang terbuka hijau, dan bentuk pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan mengembangkan kawasan yang dianggap membutuhkan ruang terbuka hijau, serta memberikan sanksi bagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Kehutanan, Dinas Binamarga, dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam perencanaan dan pemanfaatan kawasan khususnya kawasan ruang terbuka hijau.

6. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau

1. Arahana insentif berupa:

- pemberian keringanan pajak;
- pemberian kompensasi;
- pengurangan retribusi;
- penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- kemudahan perizinan.

2. Arahana disinsentif berupa :

- pengenaan kompensasi;
- persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- kewajiban mendapatkan imbalan;
- pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- persyaratan khusus dalam perizinan.

3. Arahan Sanksi

1. Jenis-jenis pelanggaran :

- Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- Tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
- Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang
- Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagailik umum

2. Jenis-jenis Sanksi

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan;
- penghentian sementara pelayanan umum;
- penutupan lokasi;
- pencabutan izin;
- pembatalan izin;
- pembongkaran bangunan;
- pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- denda administratif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan (RTHKP), lingkup pengendalian RTHKP meliputi :

- a. Target pencapaian luas minimal;
- b. Fungsi dan manfaat;
- c. Luas dan lokasi; dan
- d. Kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.

Pengendalian dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban.

7. Peran Masyarakat Dalam Upaya Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bulukumba

Masyarakat Kabupaten Bulukumba terkait peran sertanya dalam penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan setiap program dari pemerintah Kabupaten Bulukumba, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkabupatenan. Penataan RTHKP melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga, badan hukum, dan/atau perseorangan. Hal ini dapat dilakukan pada proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang juga diatur dalam Pasal 86 Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam penataan ruang juga merupakan hal yang sangat

penting dalam keberhasilan dari pelaksanaan setiap kebijakan dari pemerintah. Dalam pasal 86 Perda RTRW Kabupaten Bulukumba, kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Sedangkan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui perangkat pemerintahannya dalam Pasal 54 Perda No. 21 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba mengatur beberapa ketentuan untuk mengendalikan adanya penyalahgunaan fungsi ruang tersebut, yaitu :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Indikasi arahan peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang pola ruang (koefisien daerah hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan, koefisien zona terbangun), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

- b. Ketentuan Perizinan

Perizinan yang terkait tentang izin pemanfaatan ruang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Untuk Kabupaten Bulukumba sendiri yang pada dasarnya memiliki luas lahan yang berpotensi untuk ruang terbuka hijau, seharusnya dalam pemanfaatannya bisa dioptimalkan.

Namun pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkendala pada kepemilikan lahan oleh warga Kabupaten Bulukumba.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan keterbatasan anggaran belum mampu membeli lahan yang diprioritaskan khusus untuk ruang terbuka hijau, apalagi untuk membeli lahan diluar dari kawasan Kabupaten Kabupaten Bulukumba, maka setidaknya pemerintah akan mengusahakan ruang terbuka privatnya. Dengan cara misalnya pada waktu orang akan mengajukan IMB maka KDBnya yang akan diteliti yaitu berapa persen Koefisien Dasar Bangunan tersebut yang dapat didirikan bangunan jadi tidak boleh dari 100% luas lahan seseorang didirikan suatu bangunan, sehingga harus menyediakan beberapa persen lahan misalnya 30% untuk dibuat ruang terbuka semisal taman. Maka hal ini yang dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten untuk menambah kekurangan presentase ruang terbuka hijau. Untuk saat ini pemerintah kabupaten belum menghitung existing dari jumlah lahan yang digunakan untuk ruang terbuka hijau karena perencanaannya tidak semudah itu.

Ketentuan yang sesuai Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah, yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba bagi pihak swasta ataupun masyarakat adalah

pihak yang akan mendirikan bangunan berupa gedung perbelanjaan ataupun hotel-hotel harus mengajukan dahulu IMB dan *adjust planning* (keterangan untuk perencanaan) dengan menyertakan presentase ruang terbuka (misalkan 30% dari luas yang akan dibangun) baik bisa digunakan sebagai lahan parkir dan pertamanan, Dalam Perda tentang RTRW, Wilayah Kabupaten Bulukumba dibagi ke dalam beberapa zona wilayah pembangunan. Dalam setiap zona wilayah terdapat berbagai susunan bangunan yang diperbolehkan menurut ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

c. Ketentuan insentif dan disinsentif

Peraturan Daerah tentang RTRW harus dapat ditaati oleh segenap pihak. Untuk itu dalam implementasinya maka pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menerapkannya dengan bijaksana sehingga tidak serta merta semisal suatu lahan dituntut menjadi ruang terbuka padahal lahan tersebut masih dalam sengketa dengan privat. Maka pemerintah memiliki cara yaitu *insentif* dan *disinsentif*. Misalkan apabila ada pihak yang ingin menggunakan sebagian lahannya atau ruang miliknya untuk digunakan menjadi ruang terbuka hijau sesuai dengan RTRW maka pemerintah akan memberikan insentif yaitu misalkan keringanan pajak, namun bila mereka memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencananya maka pemerintah akan membebankan

disinfektif yaitu pembebanan pajak. Sehingga pemerintah tidak serta merta melarang pembangunan tanpa pemanfaatan ruang terbuka karena masyarakat juga memiliki hak atas ruang.

Apabila dalam penerapan kebijaksanaan, misalkan ada suatu lahan dimana lahan tersebut merupakan tanah warisan turun menurun dan memiliki legitimasi hukum yang kuat serta mempunyai sertifikasi hak milik tanah, dan dalam perencanaan kebijakan pemerintah pemanfaatannya lain. Sebagaimana tertera dalam Pasal 81 Perda No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba mengenai arahan insentif dan disinsentif.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

Salah satu aspek yang menjadi gagasan materi muatan konstitusi adalah kebijakan hukum pengelolaan lingkungan. Konstitusi yang memuat kebijakan hukum pengelolaan lingkungan inilah yang oleh Jimly Asshiddiqie disebut dengan “konstitusi hijau” atau “*green constitution*”. Konstitusi hijau atau *green constitution* dengan demikian menunjukkan kadar materi muatan konstitusi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Semakin lengkapnya hal-hal mendasar mengenai norma pengelolaan lingkungan dimuat dalam konstitusi, maka semakin “hijau”-lah suatu konstitusi atau semakin pantas disebut “konstitusi hijau”. Demikian pula sebaliknya.³³

³³ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 13.

1. Istilah dan Pengertian

Ada beberapa istilah atau konsep dan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum di bidang ini, di antaranya St. Munadjat Danusaputro, Mochtar Kusumaatmaja, Koesnadi Hardjasoemantri, H.J.J. Leenen, Th. G. Drupsteen, dan sebagainya. Meskipun para ahli ini memberikan rumusan pemahaman yang berbeda, ada satu kesamaan pandangan, yakni bahwa Hukum Lingkungan itu harus menggunakan pendekatan “holistik” atau utuh menyeluruh. Oleh karena itu Hukum Lingkungan harus banyak berguru pada ekologi, artinya menerapkan prinsip dan pendekatan ekologi. Hal ini dapat dipahami, karena masalah lingkungan yang merupakan objek pengaturan Hukum Lingkungan pada hakikatnya adalah masalah ekologi.³⁴

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada tiga dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environmental concern*.³⁵

Hakikat hukum adalah norma atau kaidah yang menetapkan perintah, larangan dan kebolehan. Asas merupakan dasar rasional

³⁴ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Penerbit Arus Timur, Makassar, 2014, hlm. 111.

³⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 2005, Edisi VIII. hlm. 39.

untuk memberikan jastifikasi mengapa norma tertentu harus diberlakukan dan dipertahankan berlakunya di dalam masyarakat. Lembaga dan proses adalah sarana maupun mekanisme untuk mewujudkan berlakunya norma dalam kenyataan. Oleh karena itu, hukum tidak semata-mata kaidah, namun juga meliputi proses beserta lembaga untuk mempertahankan kaidah tersebut.

Istilah Hukum Lingkungan terdiri dari kata “Hukum” dan “Lingkungan”. Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri mengartikan hukum sebagai “keseluruhan asas dan norma yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya norma di masyarakat”.³⁶

Menurut Yunus Wahid dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Lingkungan mengatakan bahwa istilah hukum lingkungan atau *Environmental Law* merupakan istilah yang umum dikenal dan digunakan dalam mengungkapkan substansi hukum yang dimaksud, dapat dipahami, mudah diingat, enak diucapkan dan lebih praktis.³⁷

Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh Hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara

³⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁷ Yunus Wahid, *loc.cit.*, hlm. 112.

tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.³⁸

Hukum Lingkungan sebagai bentuk aturan tertulis yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar dan landasan untuk menjaga keberlangsungan dari sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi potensi utama Bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara berkembang yang utuh dan bertanggungjawab penuh terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945.

Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan.³⁹

Pembagian Hukum Lingkungan Klasik dan Modern pada dasarnya dilihat dari aspek penggunaan dan pemanfaatan dari Lingkungan Hidup itu sendiri, seperti halnya yang dikemukakan oleh Moenadjat.

Moenadjat membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment-oriented law*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁹ Yunus Wahid, *op.cit.*, hlm. 41.

dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*.⁴⁰

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁴¹

Istilah Lingkungan secara normatif diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPLH, lingkungan hidup ialah :

"Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Unsur-unsur lingkungan hidup mencakup :

⁴⁰ Yunus Wahid, *loc.cit.*, hlm. 41.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 41.

1. Lingkungan non hayati yang dibentuk oleh sumber daya alam non-hayati;
2. Lingkungan hayati yang dibentuk oleh sumber daya alam hayati;
3. Lingkungan buatan yang dibentuk oleh sumber daya buatan;
4. Lingkungan sosial yang dibentuk oleh perilaku manusia.

Melalui pendekatan ekosentris dan bukan antropo sentries, pengelolaan masing-masing sub-lingkungan di atas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara holistik untuk kepentingan lingkungan itu sendiri. Pembebanan yang tidak seimbang pada salah satu sumber daya lingkungan hidup menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan kemampuan lingkungan dalam mendukung kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya.

Hukum lingkungan dengan demikian dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan norma yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya sebagai satu kesatuan yang mampu mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hukum Lingkungan

Perkembangan Hukum Lingkungan dimulai sejak Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia, tanggal 16 Juni 1972 yang secara lengkap disebut "*Declaration of The United Nation Conference on the Human Environment*) yang lazim disebut "Deklarasi Stockholm".

Peraturan perundang-undangan sebagai pengejawantahan Hukum Lingkungan yang mengatur masalah lingkungan hidup yang berfokus pada PPLH, harus menyesuaikan diri dengan sifat dan ruang lingkup masalah yang diaturnya, yang pada hakikatnya adalah masalah ekologi.⁴²

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup sejak tahun 1978 yaitu mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 1916 di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg, hingga saat ini peraturan mengenai Lingkungan Hidup telah banyak mengalami perubahan, mengikuti perkembangan dari hal yang menjadi aspek yang diatur dalam setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, gagasan pengelolaan lingkungan hidup (PLH-UU No. 32 Tahun 2009 menggunakan istilah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-PPLH) dan pembangunan yang salah satu aspeknya adalah pengaturan hukum tersebut. Selanjutnya dimasukkan sebagai bagian integral dengan program pembangunan

⁴² Yunus Wahid, *op.cit.*, hlm. 153.

nasional melalui Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN yang merupakan Kebijakan Nasional (*State Policy*). Pada Bab III butir 10 GBHN tersebut, dituangkan “Kebijaksanaan Nasional tentang Lingkungan Hidup”.⁴³

Gagasan ini kemudian menghasilkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), yang merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur PLH di Indonesia. Seiring perkembangannya kemudian UULH ini dirasa perlu penyesuaian dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin berkembang, sehingga diundangkanlah Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Yunus Wahid dalam bukunya Pengantar Hukum Lingkungan mengatakan bahwa antara UULH dan UUPLH, Prinsip, pendekatan dan orientasinya tetap sama, yakni pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Jika usia berlakunya UULH sekitar 15 tahun (11 Maret 1982-19 September 1997), maka usia UUPLH hanya sekitar 12 tahun (19 September 1997-3 Oktober 2009) dan tugasnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁴³ Yunus Wahid, *op.cit.*, hlm. 126.

Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 2009 No. 140 –TLN RI No. 5059, tanggal 3 Oktober 2009).⁴⁴

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai Undang-undang yang baru yang mengatur mengenai Lingkungan Hidup kemudian diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini perlu menjadi hal yang diprioritaskan dalam perkembangan pembangunan berbasis lingkungan hidup. Hal ini juga menjadi bentuk penyesuaian dengan perkembangan ketatanegaraan pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

3. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Prinsip Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan tindakan atau yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup, baik pada tahap penentuan kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendaliannya untuk mencapai kelestarian fungsinya.

Prinsip ini dimuat dalam pasal 5 ayat (91) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁴ Yunus Wahid, *op.cit.*, hlm. 136.

(UUPLH), dan merupakan penjabaran dari prinsip ke-1 Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan sebagai berikut :

"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a duality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations".

Manusia memiliki hak kebebasan yang mendasar, persamaan dan kondisi kehidupan yang mencukupi dirinya, di dalam suatu lingkungan yang menghargai adanya martabat manusia dan tanggungjawab untuk melindungi lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang.

Prinsip tersebut mengandung 2 (dua) dimensi. *Pertama*, Pemerintah mengakui bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar yang harus mendapat perlindungan dari semua pihak. Khususnya bagi Pemerintah, bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak ini adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengambil bagian dalam prosedur administratif : seperti berperan serta atau hak banding terhadap penetapan administratif.

Kedua, merupakan bentuk perlindungan ekstensif (luas) terhadap hak-hak perseroangan, sehingga dapat memberikan landasan gugatan hukum atau hak menuntut kepada setiap orang yang merasa haknya atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat diganggu pihak lain. Menurut Reinhard Streiger, hak menggugat atau

menuntut atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:⁴⁵

- a) *The function of defence (Abwehrfunktion), the right of the individual to defend himself against an interference with his environment which is to his disadvantage;*
- b) *The function of performance (Lesitungsfunktion), the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment.*

Fungsi tersebut meliputi Fungsi untuk bertahan, yakni hak setiap orang untuk mempertahankan diri dari tindakan-tindakan pihak lain yang merugikan Lingkungan Hidupnya. Fungsi untuk menuntut, yakni hak dari setiap orang untuk menuntut suatu tindakan yang bertujuan memelihara, memulihkan atau memperbaiki Lingkungan Hidupnya.

b) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) adalah salah satu prinsip yang juga dijadikan dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Pasal 3 UUPH). Prinsip ini menekankan agar pembangunan dilakukan melalui pendekatan ekosistem (*ecological approach*), yakni kegiatan pembangunan yang memperhatikan kepentingan lingkungan.

Sedangkan pengertian yuridisnya menurut Pasal 1 butir 13 UUPH adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

⁴⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit.*, hlm. 128.

Prinsip ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang dijabarkan lebih lanjut di dalam arah dan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2004-2008. PROPENAS Tahun 2000-2004 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang.

Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *ecodevelopment*. Pendekatan ini tidak menolak diubah dan diolahnya sumber alam untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia. Tetapi "kesejahteraan manusia" mengandung makna lebih luas, mencakup tidak hanya kesejahteraan material, pemenuhan kebutuhan generasi hari ini, tetapi juga mencakup kesejahteraan non fisik, mutu kualitas hidup dengan Lingkungan Hidup yang layak dihidupi (*liveable environment*) dan jaminan bahwa

kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi generasi masa depan.

Koesnadi Harjasoemantri menyatakan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan sebagai kata kunci (*keyword*) dalam rangka melaksanakan pembangunan dewasa ini maupun di masa mendatang.⁴⁶

Apabila keseimbangan lingkungan terganggu maka kualitas lingkungan juga berubah. Padahal kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup manusia.

4. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang pada intinya mengamanatkan bahwa PPLH dilaksanakan berdasarkan asas: tanggungjawab Negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Bila dirinci, asas-asas PPLH yang diatur dalam UUPPLH ini mencakup 14 asas. Dari asas-

⁴⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit.* hlm. 127.

asas ini, ada yang baru diatur secara tegas antara lain asas *ekoregion*, *asas kearifan lokal*, *asas tata kelola pemerintahan yang baik*, dan *asas otonomi daerah*.⁴⁷

Asas tersebut lebih banyak dibanding yang dianut dalam UUPPLH, yang antara lain menegaskan : “PLH yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat...” (Pasal 3 UUPPLH). Bila dirinci, UUPPLH hanya menetapkan/menganut 3 (tiga) asas, yaitu : (1) Asas tanggungjawab Negara; (2) Asas keberlanjutan; dan (3) Asas manfaat. Jadi jauh lebih sederhana dibanding dengan UUPPLH. Sementara dalam UULH ditegaskan, bahwa “PLH berasaskan *pelestarian kemampuan lingkungan* yang serasi dan seimbang..” (Pasal 3 UULH). Ini lebih simple lagi karena hanya menganut satu asas. Penjelasannya menyatakan: pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut. “Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal”.⁴⁸

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang ada dalam pasal 3 UUPPLH-2009 adalah :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

⁴⁷ Yunus Wahid, *op.cit.*, hlm. 186

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 186

- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum yang baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakkan substansi hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum tersebut dikembangkan atau didasarkan baik pada prinsip hukum internasional maupun hukum nasional. Ada prinsip yang secara tegas disebutkan dalam pasal 2 UU

No. 32 tahun 2009, tetapi masih ada beberapa prinsip lainnya yang tercermin dari substansi Undang-undang ini.⁴⁹

Sebagai pembanding, Pasal 3 UUPH (UU No. 23/1997) menyatakan: “PLH...bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “ Guna mewujudkan tujuan tersebut, pasal 4 UUPH menetapkan “sasaran-sasaran” yang harus dicapai dalam PPLH, yaitu: (a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; (c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan (f) terlindunginya Negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup. Dengan adanya sasaran-sasaran ini, kegiatan dalam PPLH menurut UUPH tampaknya lebih realistis

⁴⁹ Muhammad Akib, *op.cit.*, hlm. 110.

dan terpolakan, sehingga lebih mudah dipahami orang kebanyakan dibanding dengan apa yang diatur dalam UUPPLH tersebut.⁵⁰

Prinsip atau asas hukum yang dijadikan landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam pasal 2 UUPPLH-2009 adalah:

- a. Tanggungjawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Dari keempat belas asas tersebut, tiga diantaranya telah diakui dalam UUPPLH-1997, yaitu asas tanggungjawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat. Selebihnya merupakan

⁵⁰ Yunus Wahid, *op.cit.*, hlm. 189

penambahan asas baru dalam rangka penguatan dari prinsip yang telah ada sebelumnya.⁵¹

D. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang, Kawasan, Wilayah, dan Daerah

1. Tata Ruang

a) Definisi

Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan Ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan. Menurut pendapat Mabogonjue dalam Jayadinata (1999: 12-13) yang membagi Ruang dalam 3 macam yaitu

.⁵²

- a. Ruang mutlak, merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah berbagai benua, laut, gunung, kabupaten dan sebagainya.
- b. Ruang relatif, jika tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka dikatakan bahwa jarak AC menjadi lebih mudah dijangkau dan ruangnya relative lebih kecil.
- c. Ruang relasi, yang melibatkan unsur-unsurnya yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 111.

⁵² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 254

ruang relasi mengandung unsur-unsur dan atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat dari interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah. Karena berbagai unsur terus mengadakan relasi dan interaksi, maka dikatakan ruang relasi itu bersifat dinamis karena ruang itu terus berubah. Pengertian ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan, sehingga perencanaan pembangunan adalah perencanaan restrukturisasi ruang.

Beberapa definisi yang berkaitan dengan tata ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut :

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- b. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- c. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

- d. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- e. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- f. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- g. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tata ruang perlu direncanakan dengan maksud agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang bersangkutan.⁵³ Menurut Hasan Purbo Tata Ruang yaitu suatu wujud struktural manfaat dan fungsi ruang yang terjadi karena proses-proses sosial, ekonomis, teknologis, politis, administratif (termasuk pengubahan secara berencana) dan alamiah.⁵⁴

⁵³ Rahardjo Adisasmita, *op.cit.*, hlm. 64.

⁵⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit.* hlm. 47.

b) Asas Penataan Ruang

Berbicara masalah tata ruang harus diluruskan pada suatu kerangka pemikiran tentang bagaimana tata ruang seharusnya terselenggara sesuai dengan asasnya.

Asas penataan ruang yang dimaksud adalah asas menurut pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang antara lain disebutkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, perlindungan dan kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas.

c) Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan asas tersebut maka pada pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang bertujuan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

d) Klasifikasi Penataan Ruang

Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Dalam rangka klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan sebagai berikut:

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan;
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Secara umum, karakteristik dari Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan penjabaran lebih lanjut dari RTRW Nasional dan RTRW Provinsi, khususnya dalam hal pemanfaatan ruang dan perencanaan wilayah kabupaten.
- b. Rencana Tata Ruang Kabupaten dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Lima Tahun atau sekarang dikenal dengan istilah Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan strategis perwilayahan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana wilayah skala administrasi kabupaten yang mencerminkan strategi pengembangan wilayah kabupaten

dalam kurun waktu 10 tahun, yang dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahunan, sejalan dengan pelaksanaan Propenas.

- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran serta swasta dan masyarakat melalui penjangkaran aspirasi masyarakat, dinamis dan fleksibel serta akomodatif.

2. Kawasan

Kawasan merupakan wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu (spesifik/khusus). Kawasan yang merupakan daerah yang secara geografis dapat sangat luas atau terbatas, misalnya kawasan hutan yang luas dan kawasan perumahan yang terbatas.⁵⁵

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Adapun pembagian kawasan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut :

- a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

⁵⁵ Rahardjo Adisasmita, *op.cit.*, hlm. 58.

- b. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- c. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- d. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
- e. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- f. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di

sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

- g. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
- h. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- i. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
- j. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

3. Wilayah

Menurut Rahardjo Adisasmita sejalan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Wilayah dapat bersifat kecil misalnya wilayah desa dan dapat luas sekali apabila merupakan hasil kerja antar Negara misalnya wilayah Singapura-Johor-Riau.⁵⁶

4. Daerah

Daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Contoh, bagian dari daerah aliran sungai yang gundul harus segera dihijaukan kembali.⁵⁷

Menurut Rahardjo Adisasmita pembagian kata daerah berdasarkan sifat fungsionalnya terbagi dari daerah inti (*core region*) dan daerah metropolis atau metropolitan (*metropolitan region*).

Daerah inti (*core region*) yaitu daerah yang mempunyai ciri potensi pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan daerah metropolis atau metropolitan (*metropolitan region*) adalah wilayah kabupaten berikut pengaruh sekitarnya, kadangkala disebut sebagai “*core region*” atau “kutub pertumbuhan”, berupa kabupaten besar sebagai pusat

⁵⁶ Rahardjo Adisasmita, *op.cit.*, hlm. 58.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

pertumbuhan dengan berbagai kegiatan di bidang ekonomi, sosial, industry, perdagangan dan administrasi, bersama-sama daerah pengaruhnya memiliki potensi yang tinggi untuk perkembangan ekonomi masa depan.⁵⁸

E. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian

Penyediaan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari bentuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, maka sangat erat kaitannya dengan kelangsungan lingkungan hidup.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁵⁹

Sedangkan pengertian ruang terbuka menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kabupaten atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 66-67.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditegaskan berikut ini : ⁶⁰

- a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kabupaten paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kabupaten.
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kabupaten.

Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 29 :

Ayat (1)

“Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kabupaten, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan”.

Ayat (2)

“Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kabupaten, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kabupaten. Untuk

⁶⁰ Pasal 29 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang

lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kabupaten, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya”.

Ayat (3)

“Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat”.

Ketentuan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 berikut ini:

“Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”.

Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam Pasal 31 berikut ini:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri”.

Ruang terbuka hijau di samping berperan membentuk struktur kabupaten, juga harus tercermin dalam pola ruang kabupaten. Fungsi, manfaat, klasifikasi, dan distribusi RTH di wilayah perkotaan menjadi sangat penting, karena fungsi dan manfaat RTH tidak dapat digantikan dengan unsur-unsur ruang kota lainnya karena sifatnya yang alami.

Berbagai referensi menunjukkan bahwa RTH (*green open space/green space*) merupakan lahan-lahan alami yang ada di wilayah perkotaan. Bentuk RTH yang berupa fasilitas umum/publik, sebagai

tempat beraktivitas, adalah taman kabupaten, taman pemakaman, lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif.⁶¹

Jadi ruang terbuka hijau merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri RTH di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.⁶²

Adanya efek rumah kaca (*green house effect*) yaitu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi telah mengakibatkan pemanasan bumi. Berbagai pertemuan tingkat local, nasional, regional, hingga internasional terus digelar. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brasil (1992), KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), dan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark (2009) merupakan pertemuan berbagai Negara di dunia yang berupaya mengurangi dampak pemanasan bumi.⁶³

Dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (Earth Summit II, 2002) disepakati bahwa kabupaten-kota harus menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas kabupaten untuk

⁶¹ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *op.cit.*, hlm. 91

⁶² *Ibid.*, hlm. 92.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 92.

keseimbangan ekologis. Artinya, penyediaan RTH untuk fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbon dioksida sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan kabupaten (*urban heat island*).⁶⁴

2. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Berbagai pengertian yang selama ini dikenal, seperti dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. RTH merupakan bagian dari ruang terbuka (*open space*) yang diklasifikasikan sebagai ruang atau lahan yang mengandung unsur dan struktur alami. RTH ini dibedakan dalam dua macam : RTH alami dan RTH Binaan.⁶⁵

RTH alami terdiri atas daerah hijau yang masih alami (*wilderness areas*), daerah hijau yang dilindungi agar tetap dalam kondisi alami (*protected areas*), dan daerah hijau yang difungsikan sebagai taman public tetapi tetap dengan mempertahankan karakter alam sebagai basis tamannya (*natural park areas*).⁶⁶

RTH binaan terdiri atas daerah hijau di perkotaan yang dibangun sebagai taman kota (*urban park areas*), daerah hijau yang

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

dibangun dengan fungsi rekreasi bagi warga kota, (*recreational areas*), dan daerah hijau antar bangunan maupun halaman-halaman bangunan yang digunakan sebagai area penghijauan (*urban development open space*). Khusus daerah hijau di kawasan perkotaan dapat dikembangkan sebagai plaza, *square*, jalur hijau jalan, maupun sabuk hijau kota (*greenbelt*).⁶⁷

Ruang terbuka hijau juga dapat terdiri dari RTH pekarangan/halaman, RTH pertanian, RTH kehutanan, RTH pertamanan, RTH olahraga, RTH pemakaman, dan jenis RTH lainnya. Bentuk RTH dibedakan menjadi dua: RTH berbentuk area hijau dan RTH berbentuk jalur hijau. RTH area hijau pada umumnya digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan, biasanya berbentuk taman kabupaten, taman lingkungan, taman rekreasi, dan tanaman lebih berbentuk mengumpul dengan luasan tertentu, sedangkan jalur hijau berbentuk jalur memanjang seperti pada tepi jalan, sempadan sungai, dan tepian pantai berbentuk koridor jalur hijau (*green koridor*).⁶⁸

3. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan RTH di wilayah perkotaan menjadi sangat penting karena dapat menjaga kelangsungan ekosistem perkotaan, seperti mempertahankan siklus hidrologi dan iklim mikro, mereduksi polusi, dan memproduksi oksigen di udara yang bermanfaat untuk kesehatan.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

Tujuan pembangunan RTH sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan; menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan menciptakan kota yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan.⁶⁹

RTH sebagai infrastruktur hijau memiliki fungsi beragam, yaitu :

- a. **Konservasi tanah dan air** : Pembangunan kota lebih dimaknai sebagai pembangunan fisik perkotaan berupa gedung, jalan, jembatan, dan perkerasan. Permukaan lahan yang tertutup perkerasan dan bangunan semakin hari semakin meluas seiring dengan perubahan lahan alami menjadi lahan terbangun. Keadaan ini menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah (infiltrasi), sehingga peresapan air tanah (dangkal) terhambat. Keberadaan RTH sangat penting untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah, menyuplai cadangan air tanah, dan mengaktifkan siklus hidrologi.
- b. **Ameliorasi Iklim** : Kemajuan teknologi mampu memengaruhi iklim mikro pada ruang tertutup dalam bangunan agar lebih nyaman, tetapi belum mampu memengaruhi ruang terbuka perkotaan. Massalikasi

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 97-101.

penggunaan alat penyejuk udara (AC) terbukti berpengaruh negatif terhadap kenaikan suhu udara di ruang luar sekitar bangunan. Iklim di daerah perkotaan berkaitan dengan suhu udara, kelembaban, aliran udara, dan penyinaran matahari. Keberadaan RTH mampu menciptakan Iklim Mikro yang lebih baik.

c. Pengendali Pencemaran : Pencemaran di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota besar lainnya, pada umumnya tinggi. RTH mempunyai kemampuan mengendalikan pencemaran, baik pencemaran udara, air, maupun suara bising. Peningkatan bahan pencemar di udara, khususnya karbon dioksida akibat kegiatan industri dan kendaraan bermotor, dapat diserap tanaman dalam proses fotosintesis. Keberadaan RTH dapat mengendalikan bahan pencemar (polutan), sehingga tingkat pencemaran dapat ditekan dan konsentrasi karbon dioksida dapat berkurang.

d. Habitat Satwa dan Konservasi Plasma Nutfah : Dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, RTH dapat dijadikan sebagai habitat satwa liar (burung, serangga), tempat konservasi plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati. Keberadaan satwa liar di wilayah perkotaan memberi warna

tersendiri bagi kehidupan warga kota dan menjadi indikator tingkat kesehatan lingkungan kota.

- e. **Sarana Kesehatan dan Olahraga** : Melalui proses fotosintesis, tanaman menghasilkan oksigen (O₂), gas yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernapas. Oleh karena itu, RTH yang dipenuhi pepohonan sering disebut sebagai paru-paru kota. Keberadaan RTH sangat berperan untuk meningkatkan kesehatan dan olahraga.
- f. **Sarana Rekreasi dan Wisata** : Suasana kota yang padat bangunan dengan dinamika kehidupan yang serba cepat dan rutinitas pekerjaan sehari-hari membuat warga cepat jenuh. Warga membutuhkan suasana baru untuk bersantai dan keluar dari rutinitas sehari-hari. Mereka membutuhkan tempat rekreasi dan wisata alami. Taman lingkungan, taman kota, hutan kota, kebun binatang, kebun raya, maupun bentuk RTH rekreasi lainnya sangat berperan mengembalikan kreativitas kehidupan manusia dari rutinitas dan kejenuhan dalam bekerja. Anak-anak hingga lanjut usia dapat berkaktivitas di ruang luar. Oleh karena itu, keberadaan RTH mendukung ketersediaan RTH sebagai tempat sarana rekreasi dan interaksi sosial masyarakat.
- g. **Sarana Pendidikan dan Penyuluhan** : RTH bermanfaat sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan tentang

sumber daya alam dan lingkungan hidup. RTH dapat digunakan untuk membangkitkan cita rasa terhadap alam dan lingkungan. Keberadaan tanaman dan unsur alam lainnya sebagai habitat satwa burung secara tidak langsung menjadi sarana pembelajaran bagi warga terutama anak-anak, selain meningkatkan kualitas lingkungan kota.

- h. Area Evakuasi Bencana** : Sering terjadinya bencana di Indonesia akhir-akhir ini, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran, perlu pengembangan mitigasi bencana dengan menyiapkan area terbuka di kawasan perkotaan yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi. RTH, seperti taman, halaman, lapangan bola, dapat digunakan sebagai area evakuasi warga saat terjadi bencana.
- i. Pengendali Tata Ruang Kota** : RTH sebagai kawasan preservasi atau konservasi yang berbentuk jalur hijau dapat dijadikan alat pengendali tata ruang kota dengan fungsi sebagai sabuk hijau (*green belt*) atau jalur hijau pembatas kawasan maupun pembatas wilayah kota.
- j. Estetika** : Keberadaan RTH dapat meningkatkan daya tarik dan keindahan suatu kota. Tanaman memiliki bentuk, warna, dan tekstur beranekaragam sehingga dapat menambah keindahan pemandangan lanskap kota. Di

samping itu, sebagai unsur yang hidup dan berkembang, tanaman dapat berubah dari waktu ke waktu (bersemi, berbunga, berbuah, rontok, dan sebagainya) sehingga menjadi daya tarik tersendiri.

4. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RTH, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 H Ayat (1) tentang hak seseorang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAH).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang perubahan pertama dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP).
19. Permen Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Permen PU).

Berdasarkan landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa betapa pentingnya mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam hal ini penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau khususnya di daerah perkotaan, sebagai pusat berbagai kegiatan masyarakat dalam mengikuti perkembangan pembangunan yang semakin maju dan modern.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Daerah Kabupaten Bulukumba dengan sasaran penelitian yaitu perangkat pemerintah Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, aktivis lingkungan hidup, LSM, serta instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer, yaitu :

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan atau dari lokasi penelitian yaitu jenis penelitian studi lapangan (*Study Field*), dalam hal ini adalah perangkat dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yaitu dari Dinas Tata Ruang, Kantor Lingkungan dan Satuan tugas yang terkait.

b. Data sekunder, yaitu :

Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain-lainnya.

Jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*).

C. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

1. Untuk mengumpulkan data primer (*field research*), yakni pengumpulan datanya penulis melakukannya dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden/nara sumber dan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini.
2. Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), yakni pengumpulan datanya penulis melakukannya dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

D. Analisis Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.⁷⁰

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.

⁷⁰ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.* hlm. 229.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bulukumba Terhadap Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km dari Makassar Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 km² atau 1,85% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu sebagai ibu kota Kabupaten, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. 7 diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sebagai sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga

mempunyai 2 (dua) buah pulau yang terdapat pada wilayah Desa Bira Kecamatan Bontobahari yakni Pulau Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing (tidak berpenghuni).

Kawasan ruang terbuka hijau yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu terdapat di dua Kecamatan yakni Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang sebagai wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan Kabupaten Bulukumba. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (6) Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba.

“Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, dan PPK”.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa⁷¹. Dan dalam Pasal 10 ayat (2) Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba dijelaskan, bahwa yang termasuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kecamatan Ujung Bulu

⁷¹ Pasal 1 Ketentuan Umum Perda No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba.

dan Kecamatan Gantarang. Oleh karena itu, mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bulukumba Terhadap Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau terdapat di kawasan perkotaan Kabupaten Bulukumba yakni Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang.

1. Kecamatan Ujung Bulu

Kecamatan Ujung Bulu sebagai ibu kota Kabupaten Bulukumba terdiri dari sembilan kelurahan, yakni kelurahan : Tanah Kongkong, Kasimpureng, Loka, Bentenge, Terang-Terang, Caile, Ela-Ela, Kalumeme, dan Bintarore. Kecamatan Ujungbulu mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dikarenakan sebagai ibu kabupaten dan aktivitas yang tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dan luas daerah relatif kecil jika dibandingkan kecamatan lainnya.

Sebagai pusat kegiatan wilayah, Kecamatan Ujung Bulu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi pusat pembangunan infrastruktur fisik yang menunjang kegiatan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Pasal 46 Perda RTRW Kabupaten Bulukumba juga menetapkan Kecamatan Ujung Bulu sebagai kawasan peruntukan perdagangan skala regional dan kawasan peruntukan olahraga. Dan dalam Pasal 76 Perda RTRW Kabupaten Bulukumba mengenai ketentuan umum peraturan zonasi ditetapkan bahwa kawasan peruntukan olahraga dan peruntukan perdagangan harus terdapat penyediaan kawasan ruang terbuka hijau. Semakin

meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bulukumba, kemudian berimplikasi pada pembangunan kawasan ruang terbuka hijau yang juga semakin sempit. Mengingat pentingnya kawasan ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang kondisi lingkungan Kabupaten Bulukumba, maka seharusnya pembangunan infrastruktur fisik diimbangi dengan pembangunan kawasan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba, bahwa instansi pelaksana dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri atas pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu Bupati, DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yakni dinas-dinas yang kemudian mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam kordinasi penataan ruang di daerah Kabupaten Bulukumba, pemerintahan tingkat kecamatan dan Desa serta masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Ujung Bulu yakni bapak Aprisal pada tanggal 24 Maret 2014, beliau mengatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Perda RTRW tersebut khususnya mengenai pembangunan kawasan ruang terbuka hijau berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba, dilakukan dengan sistem kordinasi dengan

Dinas Tata Ruang, Kantor Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan. Penetapan peruntukan kawasan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang, kemudian Kantor Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi terkait kondisi serta potensi lingkungan, dan Dinas Kehutanan kemudian bekerjasama dalam hal penyediaan bibit tanaman untuk ruang terbuka hijau. Selain itu khusus untuk program di tingkat kecamatan, khususnya kecamatan Ujung Bulu melibatkan masyarakat dalam kegiatan penghijauan, misalnya penanaman pohon dan kegiatan rutin bakti sosial yang dilakukan setiap seminggu sekali, yang dilakukan secara bergilir di setiap kelurahan di Kecamatan Ujung Bulu.

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengembangan kawasan ruang terbuka hijau dengan menetapkan beberapa program dalam penataan ruang terbuka hijau, yaitu Pembuatan Taman Kota yang terdapat di kawasan Pasar Lama, Bundaran Phinisi, Lapangan Pemuda, Mesjid Agung, dan *Islamic Center* Kabupaten Bulukumba, dan Penanaman Pohon bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba dalam menyediakan bibit pohon. Program tersebut tidak terlepas dari kordinasi dengan perangkat pemerintahan ditingkat kecamatan, yakni Kecamatan Ujung Bulu dan Lurah setempat.

Saat ini terdapat program dalam penataan ruang terbuka hijau yang merupakan program dari pemerintah pusat yaitu Kementerian

Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Program ini hanya ditujukan kepada empat kabupaten di Sulawesi Selatan, dengan nama program Pembangunan dan Pengelolaan Kota Hijau (P2KH). Kabupaten yang termasuk dari program ini yaitu Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Pare-Pare. Kabupaten yang termasuk dari program ini merupakan kabupaten yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan salah satu syarat yang ditentukan yaitu harus ada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Kabupaten Bulukumba telah memiliki Peraturan Daerah tersebut yaitu Perda No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba. Program ini berorientasi pada pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Dinas Kehutanan kemudian mewujudkan program tersebut bekerjasama dengan setiap instansi terkait termasuk perangkat pemerintahan ditingkat kecamatan, lurah, dan desa dengan menyediakan Hutan Kota yang terdapat di beberapa lokasi di Kecamatan Ujung Bulu, diantaranya Hutan Kota di sekitar Pantai Merpati dengan luas 4,00 Ha, hutan kota depan Kantor Pertanian Jl. Sultan Hasanuddin dengan luas 0,25 Ha, dan hutan kota di Bantaran Sungai Teko dengan luas 13,25 Ha.⁷²

⁷² Data Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba juga memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam mengeluarkan Izin Membangunan Bangunan (IMB) bahwa setiap pembangunan rumah, gedung, hotel, perkantoran, dan bangunan lain harus menanam pohon minimal dua pohon dan maksimal sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan luas dan besar bangunan. Dan bila terjadi pelanggaran pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba berhak memberikan sanksi administratif, sanksi teguran secara tertulis maupun lisan.

Rencana pembangunan dan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bulukumba Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya telah membuat dalam bentuk Laporan Akhir Rencana Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bulukumba Tahun 2013.

Kebutuhan RTH

- berdasarkan Luas Wilayah : 601,37 Ha atau 30 %,
- berdasarkan Jumlah Penduduk : 650 Ha atau 33 %,
- berdasarkan Fungsi Tertentu (Oksigen) : 603,96 Ha atau 29%.

Potensi Luas RTH Total

- (Publik & Privat) : 969,88 Ha atau 48,35 % dari luas wilayah kota
- RTH Publik : 769,43Ha atau 38,35%,
- RTH Privat : 200,45 atau 10. %.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki potensi 48,35% untuk pengembangan kawasan ruang terbuka hijau. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka ketentuan dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan minimal 30% Kawasan Ruang Terbuka Hijau, untuk Kabupaten Bulukumba telah melebihi ketentuan tersebut dilihat dari potensinya. Namun, saat ini masih belum dapat 30% dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. Saat ini Kabupaten Bulukumba telah memiliki kawasan ruang terbuka hijau kurang lebih 20% termasuk program dari pemerintah pusat yaitu P2KH, karena beberapa program pemerintah kabupaten masih dalam proses pengembangan lebih lanjut terkait observasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ruang terbuka hijau.⁷³

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba juga menetapkan beberapa program untuk mendukung pemenuhan kawasan ruang terbuka hijau yakni minimal 30% dari luas wilayah sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba diantaranya melakukan penghijauan lingkungan baik di dalam kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan, penanaman pohon dan kegiatan konservasi (sumber resapan air), pengembangan hutan rakyat, pembinaan masyarakat, dan pembagian bibit gratis kepada masyarakat. Dinas Kehutanan juga

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Sahar Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Bulukumba

bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan setiap program yang ditetapkan dengan meminta dan memberikan data terkait kawasan kritis yang masih membutuhkan pengembangan ataupun yang masih kurang produktif untuk dilakukan penanaman pohon dan penghijauan.

Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba yang bertanggungjawab dan menangani pengelolaan dan penataan kawasan ruang terbuka hijau. Seperti halnya Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba, menjadi tugas pokok dan fungsinya memberikan rekomendasi dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bulukumba terkait data kawasan yang berpotensi untuk pengembangan kawasan ruang terbuka hijau, terkait jenis vegetasi yang dikembangkan, dan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga swasta, masyarakat atau pun instansi pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bulukumba termasuk ruang terbuka hijau.

Kantor lingkungan Hidup bekerja berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik, produktif, dan berkelanjutan. Data dari kantor lingkungan hidup menerangkan bahwa presentase luas RTH dibandingkan dengan luas wilayah Perkotaan/*urban area* untuk Kabupaten Bulukumba yaitu 31,82% dengan melihat potensi

vegetasi tutupan yang tersebar pada seluruh kawasan di Kabupaten Bulukumba.⁷⁴

Khusus untuk pembangunan jalur hijau terdapat di sepanjang jalan kawasan kota Kabupaten Bulukumba, namun masih dalam proses pertumbuhan sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang hijau.

2. Kecamatan Gantarang

Kecamatan Gantarang yang juga sebagai pusat kegiatan wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri dari tiga kelurahan dan delapan belas Desa. Ketiga kelurahan tersebut termasuk dalam kawasan perkotaan Kabupaten Bulukumba., yakni Kelurahan Matekko, Kelurahan Jalanjang, dan Kelurahan Mariorennu.

Sebagai kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri, khususnya industri kayu dan kapas. Dan juga sebagai kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Perda No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba, maka juga semestinya menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pembangunan kawasan ruang terbuka hijau untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyediaan kawasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Gantarang khususnya di daerah

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ardi Nur Kepala Seksi pemantauan, pencegahan, dan pemulihan lingkungan di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bulukumba.

permukiman perkotaan yang juga termasuk sebagian wilayah Kecamatan Gantarang masih sangat kurang. Sedangkan dalam Pasal 75 Perda RTRW Kabupaten Bulukumba ketentuan umum peraturan zonasi terdapat ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau untuk kawasan permukiman perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak A. Mappiwali sebagai sekretaris Camat Gantarang, bahwa penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Gantarang masih sangat kurang, khususnya di daerah yang telah terbangun pabrik industri kayu dan pengolahan gabah, begitu pun untuk jalur hijau di sepanjang jalan raya Kecamatan Gantarang. Untuk program Kecamatan sendiri menurut bapak A. Mappiwali mengatakan bahwa perangkat pemerintahan ditingkat kecamatan hanya sebagai pelayanan administrasi atau fasilitator masyarakat sehingga tidak memiliki program yang lebih spesifik mengenai pembangunan kawasan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, Dinas Tata Ruang dan Dinas Kehutanan ataupun Dinas terkait tetap melakukan kordinasi terkait pelaporan disetiap pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Gantarang. Misalnya mengenai pembangunan drainase, jalan, dan penyediaan infrastruktur di Kecamatan Gantarang.

Kecamatan Gantarang yang juga merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang rawan bencana banjir, abrasi, dan tsunami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 dan 35 Perda RTRW

Kabupaten Bulukumba, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya pemerintahan ditingkat kecamatan dan kelurahan setempat dalam mengelolah dan melestarikan lingkungan di Kecamatan Gantarang.

Semakin meningkatnya pembangunan juga membawa pengaruh yang besar terhadap struktur dan kultur tanah sebagai ruang pembangunan. Sebagai akibat dari semakin meningkatnya volume pembangunan, maka struktur tanah mengalami perubahan besar. Banyak tanah atau ruang yang seharusnya dipergunakan untuk ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi tanah untuk pemukiman, perkantoran, pusat bisnis, dan kepentingan lainnya. Hal ini dapat dilihat dibantaran sungai Teko Kecamatan Gantarang dan sawah di sebagian Kecamatan Ujungbulu yang seharusnya digunakan sebagai ruang terbuka hijau tetapi pada kenyataannya digunakan untuk pemukiman bahkan digunakan sebagai tempat usaha.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba memiliki fungsi kordinasi untuk menyampaikan laporan dari masing-masing instansi yang terkait dalam hal pemanfaatan dan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau. Hal ini dilakukan setiap sekali seminggu dalam bentuk rapat kordinasi yang dilaksanakan di kantor Bupati Bulukumba, dan dalam rapat ini masing-masing instansi melaporkan terkait rencana, pelaksanaan, kendala, serta hasil dari observasi di lapangan terkait pemanfaatan kawasan khususnya

kawasan ruang terbuka hijau. Ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pengendalian dan pengawasan Penataan Ruang di Kabupaten Bulukumba.

Instansi-instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang terkait dengan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau, lebih di amanatkan kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Kehutanan, dan Kantor Lingkungan Hidup. Meskipun untuk instansi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang lain tidak lepas dari fungsi kordinasi untuk saling membantu dan bekerjasama dalam pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian kawasan ruang terbuka hijau.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bulukumba Terhadap Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Posisi dan kondisi Kabupaten Bulukumba dalam konteks interaksi dengan kawasan di sekitarnya begitu terbuka dan mudah diakses, membawa konsekuensi-konsekuensi yang mau tidak mau harus ditanggung dan diupayakan solusinya. Berdasarkan pada situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini terdapat perbedaan nilai-nilai yang dianut tentang pemanfaatan ruang antara pemerintah dan masyarakat.

1. Perbedaan Nilai-Nilai yang Dianut Tentang Pemanfaatan Ruang Antara Pemerintah dan Masyarakat

Berdasarkan pantauan penulis di lapangan masih ada benturan-benturan mengenai perbedaan kepentingan antar manusia, dari yang sekedar untuk mendapatkan ruang hidup saja, dengan kepentingan yang hendak memperoleh hak penguasaan atau kepemilikan yang berlebih-lebihan, antara kepentingan pembangunan dan kepentingan perorangan. Berbagai kepentingan itu seringkali sulit untuk menentukan penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang terkait, oleh karenanya dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.

Keberadaan ruang terbuka hijau seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan yang lebih menguntungkan dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Misalnya, disekitar ruko-ruko depan pasar sentral Bulukumba terdapat banyak bangunan-bangunan yang tidak menyediakan ruang terbuka hijau, tidak adanya ruang untuk penanaman pohon atau taman yang merupakan jenis ruang terbuka hijau privat. Akibatnya, kebutuhan ruang (khususnya RTH) untuk berlangsungnya fungsi ekologis kurang terakomodasi, dan berdampak pada permasalahan manajemen pengelolaan RTH. Apalagi untuk Kabupaten seperti Bulukumba, permasalahan harga tanah yang semakin tinggi, sehingga sebagian

warga lebih memilih untuk pembangunan gedung daripada untuk ruang terbuka hijau.

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba menganut nilai memanfaatkan tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan sekitar dan harus memperhatikan estetika, untuk kepentingan semua pihak. Sedangkan masyarakat Kabupaten Bulukumba pada umumnya berpandangan bahwa tentang pemanfaatan ruang harus bernilai ekonomi, sehingga kebanyakan ruang yang berpotensi sebagai kawasan ruang terbuka hijau misalnya persawahan, dialihfungsikan menjadi kawasan terbangun dengan mendirikan toko dan ruko sebagai pusat usaha dan bisnis. Masih banyaknya vegetasi yang sengaja ditanam terganggu oleh ternak warga, dan masih banyaknya warga yang melakukan perambahan hutan juga menjadi kendala persoalan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Permasalahan tersebut juga tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mensosialisasikan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, kurangnya sosialisasi tentang kebijakan yang diberlakukan dan masih kurang menerapkan ketentuan insentif dan disinsentif bagi masyarakat. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

2. Pembebasan Lahan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ardi Nur dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba pada tanggal 25 Maret 2014 beliau mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bulukumba ada sedikit hambatan meskipun Pemerintah Kabupaten telah melakukan sosialisasi. Sehingga pekerjaan Pemerintah Kabupaten belum berjalan dengan baik. Salah satunya yang menjadi kendala adalah masalah kepemilikan lahan. Lahan yang masih terbatas karena masalah pembebasan lahan, merupakan hal yang sangat identik dengan persoalan anggaran. Anggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba yang masih kurang untuk membeli lahan sebagai upaya penyediaan kawasan ruang terbuka hijau, menjadi persoalan yang sangat klasik dalam pembangunan di setiap daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Juharta anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 25 Maret 2014, bahwa penggunaan anggaran dari tingkat nasional hingga daerah yang menjadi prioritas utama adalah Pendidikan dan yang kedua adalah kesehatan. Sehingga untuk penganggaran di bidang tata ruang

khususnya pengelolaan lingkungan hidup memang tidak memiliki porsi yang besar untuk itu.

3. Tingkat Pemeliharaan dan Pengawasan Yang Masih Kurang

Menurut bapak Ardi Nur masalah sebenarnya yang dihadapi saat ini adalah bukan terletak pada regulasinya tapi pada tingkat pengawasan yang masih kurang, pengawasan pada dokumen misalnya, saat mengeluarkan IMB terdapat pernyataan siap melakukan instruksi pemerintah dalam pemenuhan RTH, namun di lokasi tidak sesuai sebagaimana mestinya. Masyarakat terkadang menganggap hal tersebut bukan merupakan hal yang dianggap penting, yang terpenting menurut masyarakat adalah ketika urusan administrasi perizinan telah ada dan bangunan telah berdiri, maka selesai juga tanggungjawab masyarakat untuk berurusan dengan pemerintah.

Pemerintah juga kemudian tidak lagi menindaklanjuti persoalan tersebut. Sehingga hal ini kemudian menjadi tanggungjawab Kantor Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dokumen secara berkala, yang dilakukan setiap enam bulan sekali terhadap semua pihak yang melakukan pembangunan fisik dan juga memberikan rekomendasi kepada Bupati Bulukumba terhadap pihak yang tidak mengindahkan ketentuan yang ditetapkan.

Begitupun dari segi pemeliharaan pemerintah tidak melaksanakan secara optimal. Kawasan yang telah dibuat dan diperuntukkan untuk kawasan ruang terbuka hijau tidak dirawat secara rutin. Misalnya

kawasan hutan kota yang baru saja dibangun, telah banyak rumput dan tanaman yang sudah mati tidak diganti dengan yang tanaman yang baru, begitu juga untuk tanaman disepanjang jalan yang termakan oleh ternak warga.

Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif juga tidak menyediakan dokumen survei awal (dokumen perencanaan) untuk menopang pelaksanaan RTRW dan tindak lanjut dari rencana pembentukan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih sementara proses rancangan dari eksekutif juga menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan ruang terbuka hijau yang mengatur lebih spesifik penataan ruang terbuka hijau sebagai penopang pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba.⁷⁵

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah kehilangan besar dengan adanya bangunan pusat bisnis dan pertokoan serta permukiman baru yang tidak menyesuaikan ketentuan dari perijinan saat melakukan pembangunan. Terkadang karena tidak adanya lahan lain untuk pembangunan sehingga mengorbankan lahan publik digunakan untuk pusat bisnis.

Sehingga hal ini menjadi potret masalah ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Sebagai penyelesaiannya maka Pemerintah Kabupaten seharusnya mengevaluasi sejumlah daftar perijinan IMB untuk pendirian bangunan-bangunan baru dan bangunan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyadi Anggota DPRD Kab. Blukumba

lama yang melanggar ketentuan dan lebih mengoptimalkan fungsi dari strategi insentif dan disinsentif serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran demi mengendalikan pemanfaatan ruang serta sebagai salah satu upaya pengoptimalan ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau.

4. Peran Serta Masyarakat yang Masih Kurang

Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tapi masyarakat juga sangat menentukan keberlangsungan dari pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau. Maka semua pihak harus terlibat, sebagai pihak yang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan penyediaan ruang hijau di Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan membagikan kuesioner kepada seratus orang sampel yaitu masyarakat sebagai responden dan kuesioner terkait pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba.

Tabel.1

| Pertanyaan | Jawaban Responden (%) | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | Tahu | Sangat Tahu | Kurang Tahu | Tidak Tahu Sama Sekali |
| Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bulukumba? | 15 | 9 | 48 | 28 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pengetahuan warga terkait Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba 15% responden menjawab tahu, 9% sangat tahu, 48% kurang tahu, dan 28% yang tidak tahu sama sekali.

Tingginya presentase masyarakat yang masih kurang tahu terkait Perda tersebut, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel.2

| Pertanyaan | Jawaban Responden (%) | | | |
|--|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| | Pernah | Sering | Kadang-kadang | Tidak Pernah |
| Apakah Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bulukumba terhadap Peraturan Daerah yang diberlakukan? | 21 | 13 | 22 | 44 |

Dan hasil kuesioner mengenai peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait Perda yang diberlakukan menunjukkan 21% responden menjawab pernah, 13% sering, 22% kadang-kadang, dan 44% yang menjawab tidak pernah. Hal ini semakin mempertegas bahwa kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan setiap Peraturan atau kebijakan yang diambil kepada masyarakat.

Tabel.3

| Pertanyaan | Jawaban Responden (%) | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | Baik | Kurang Baik | Sangat Baik | Tidak Baik |
| Bagaimana menurut Anda tentang Penataan Ruang Kab. Bulukumba dalam hal ini Penataan Pembangunan Infrastruktur Kab. Bulukumba? | 53 | 33 | 6 | 8 |

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba dalam hal ini pembangunan fisik/infrastruktur, 53% responden menjawab baik, 33% kurang baik, 6% sangat baik, 8% tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik/infrastruktur di Kabupaten Bulukumba sudah lumayan memadai, namun masih tetap ada beberapa kawasan yang tidak diimbangi dengan penyediaan kawasan hijau khususnya ruang terbuka hijau.

Tabel.4

| Pertanyaan | Jawaban Responden (%) | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | Baik | Kurang Baik | Sangat Baik | Tidak Baik |
| Bagaimana menurut Anda tentang Peran Pemerintah Kab. Bulukumba terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kab. Bulukumba? | 40 | 22 | 24 | 14 |

Hal ini juga sejalan dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel tersebut di atas yang penulis bagikan kepada seratus responden tentang peran pemerintah terhadap penyediaan kawasan ruang terbuka hijau 40% menyatakan baik, 24% sangat baik, 22% kurang baik, dan 14% tidak baik. Sehingga pada

umumnya masyarakat Kabupaten Bulukumba berpendapat bahwa peran pemerintah terkait pembangunan kawasan hijau hingga saat ini masih sangat intens dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Tabel.5

| Pertanyaan | Jawaban Responden (%) | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | Tahu | Sangat Tahu | Kurang Tahu | Tidak Tahu Sama Sekali |
| Apakah Anda mengetahui Kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kab. Bulukumba? | 42 | 3 | 46 | 9 |

Dan pengetahuan warga terkait kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau, 42% yang menjawab tahu, 3% sangat tahu, 46% kurang tahu, 9% tidak tahu sama sekali. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa sudah terdapat ruang terbuka hijau di Kabupaten Bulukumba terkait peran pemerintah 40% responden mengatakan baik, namun masih sangat kurang karena terdapat 46% responden menjawab masih kurang tahu kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

Tabel.6

| Pertanyaan | Jawaban Responden (%) | | | |
|---|-----------------------|--------|--------------|---------------|
| | Pernah | Sering | Tidak Pernah | Kadang-kadang |
| Apakah Anda dilibatkan terhadap Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kab. Bulukumba? | 20 | 7 | 62 | 11 |

Terkait pelibatan masyarakat terhadap pembangunan kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bulukumba, pada tabel tersebut di atas menunjukkan 20% responden menjawab pernah dilibatkan, 7% diantaranya menjawab sering, 62% yang menjawab tidak pernah, dan 11% yang menjawab kadang-kadang. Dari hasil tersebut yang menunjukkan bahwa masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan ruang terbuka hijau.

Tabel.7

| Pertanyaan | Jawaban Responden (%) | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Penting | Sangat Penting | Kurang Penting | Tidak Penting |
| Menurut Anda seberapa pentingkah Kawasan Ruang Terbuka Hijau? | 28 | 72 | - | - |

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan ruang terbuka hijau pada umumnya cukup baik, sesuai hasil penelitian penulis 72% responden menjawab bahwa ruang terbuka hijau itu sangat penting dan 28% yang menjawab penting. Akan tetapi kesadaran warga tidak berimbang dengan tindakan yang dilakukan terkait penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya ruang terbuka hijau privat yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi

tanggungjawab masyarakat, perseorangan atau swasta, karena dari hasil penelitian menunjukkan seperti tabel dibawah ini.

Tabel.8

| Pertanyaan | Jawaban Responden (%) | | | |
|--|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | Ada tapi kurang | Ada dan Banyak | Kadang-kadang | Tidak ada sama sekali |
| Apakah Anda menyediakan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Sekitar Anda? | 64 | 16 | 11 | 9 |

Penyediaan kawasan ruang terbuka hijau oleh masyarakat 64% responden menjawab mereka menyediakan ruang terbuka hijau tapi masih kurang, 16% yang menyediakan dengan jumlah yang cukup banyak, 11% yang kadang-kadang menyediakan, dan masih ada 9% yang sama sekali tidak ada ruang terbuka hijau yang disediakan disekitar tempat tinggalnya.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam penyediaan kawasan ruang terbuka hijau cukup baik, namun perlu ditingkatkan dari aspek sosialisasi dan peningkatan peran masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan dan ditetapkan khususnya terkait penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba, dan Peraturan Bupati Bulukumba No. 22 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

5. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana

Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di daerah Kabupaten Bulukumba sebagai penunjang dalam pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba. Misalnya penyediaan kawasan olahraga, rekreasi, dan fasilitas lain yang mendukung penyediaan kawasan ruang terbuka hijau. Sehingga masyarakat bisa lebih memahami pentingnya kawasan ruang terbuka hijau. sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut harusnya melibatkan semua elemen masyarakat serta pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata, arah kebijakannya lebih berusaha untuk dapat menerapkan ketentuan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bulukumba dan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 begitupula dalam penyediaan ruang terbuka hijau sebagai intensitas pemanfaatan ruang penyeimbang ekosistem lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba demi terjaminnya penyediaan kawasan ruang terbuka hijau sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara serius dan bertahap. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya beberapa ruang terbuka hijau di Kabupaten Bulukumba saat ini seperti Hutan Kota di daerah Pantai Merpati, Bantaran Sungai Teko, dan depan Kantor Pertanian Jl. Sultan Hasanuddin. Serta Taman Kota di tengah kota (pasar lama), dan untuk jalur hijau juga telah terdapat beberapa vegetasi yang sementara masih dalam pertumbuhan. Sehingga hal ini kemudian dapat memenuhi dan menjamin penyediaan kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bulukumba.

Keseriusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau dapat dilihat dari kebijakannya dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan saat ini juga telah ada rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rancangan RDTR saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk kemudian diusulkan ke DPRD Kabupaten Bulukumba untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sebagai upaya untuk mendapatkan RTH minimal 30% dari luas Kabupaten Bulukumba dengan standar minimal 20% untuk publik dan 10% dipenuhi dari privat untuk lebih jelasnya terdapat pada :

- 1) Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Tata Ruang
 - 2) Arah Pemanfaatan Ruang, dan
 - 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap penyediaan kawasan ruang terbuka hijau masih terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya :
- a. Perbedaan Nilai-Nilai yang Dianut Tentang Pemanfaatan Ruang antara Pemerintah dan Masyarakat

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait peraturan yang telah ditetapkan, sehingga kesadaran masyarakat akan taat hukum masih sangat kurang termasuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup khususnya penyediaan ruang terbuka hijau. Hal ini karena masih adanya benturan-benturan mengenai perbedaan kepentingan antar warga, dari yang sekedar untuk mendapatkan ruang hidup saja, dengan kepentingan yang hendak memperoleh hak penguasaan atau kepemilikan yang berlebih-lebihan, antara kepentingan ekonomi, kepentingan pembangunan untuk umum dan kepentingan perorangan.

b. Pembebasan Lahan

Masih terbatasnya lahan milik pemerintah untuk ruang terbuka hijau karena masalah pembebasan lahan dengan warga sebagai pemilik lahan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya untuk penyediaan kawasan ruang terbuka hijau

c. Tingkat Pemeliharaan dan Pengawasan Yang Masih Kurang

Pemeliharaan dan pengawasan oleh Pemerintah yang masih kurang efektif dalam upaya pembangunan dan penyediaan kawasan ruang terbuka hijau, khususnya pengawasan terhadap dokumen lingkungan untuk mendapatkan IMB. Kurangnya pemeliharaan

terhadap kondisi kawasan ruang terbuka hijau yang telah ada, misalnya pada jenis vegetasi yang termakan ternak warga, dan perawatan fasilitas taman yang tidak terawat.

d. Peran Serta Masyarakat yang Masih Kurang

Berdasarkan kuisisioner yang penulis sebarakan sebanyak seratus sampel dari dua kecamatan, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat terhadap pembangunan kawasan ruang terbuka hijau masih sangat kurang, dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan 20% responden menjawab pernah dilibatkan, 7% diantaranya menjawab sering, 62% yang menjawab tidak pernah, dan 11% yang menjawab kadang-kadang.

e. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di daerah Kabupaten Bulukumba sebagai penunjang dalam pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba. Misalnya penyediaan kawasan olahraga, rekreasi, dan fasilitas lain yang mendukung penyediaan kawasan ruang terbuka hijau.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah :

1. Seiring dengan pembangunan yang terus menerus terjadi di Kabupaten Bulukumba maka perlu adanya perhatian khusus dari

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, khususnya untuk penyediaan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menanamkan nilai-nilai tentang pentingnya kawasan ruang terbuka hijau dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan dengan mengefektifkan sosialisasi secara berkala dan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga dalam perencanaan pembangunan fisik Kabupaten Bulukumba kedepannya bisa merata tidak bersifat terpusat (tersentralisasi). Begitu pula dalam sebaran ruang terbuka hijau yang seimbang dengan pembangunan fisik di Daerah Kabupaten Bulukumba.

2. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kabupaten Bulukumba dan seiring dengan semakin menipisnya ruang terbuka hijau maka setidaknya pemerintah Kabupaten dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan ruang di sekitar pemakaman umum, tempat olahraga, dan penambahan jalur pejalan kaki (pedestrian) berupa trotoar yang layak dan memadai, yang merupakan elemen ruang Kabupaten yang sangat vital bagi kehidupan sebuah Kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pemeliharaan pembangunan ruang terbuka hijau.
3. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menerapkan dengan bijaksana ketentuan *insentif* dan *disinsentif* sebagaimana yang

diamanahkan oleh Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bulukumba. Sehingga masyarakat dapat memahami masalah kepemilikan lahan untuk pembangunan kawasan ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2004. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. 2012. PT RajaGrafindo Persada : Depok.
- Jimly Asshidiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-undang Dasar 1945*. 2009. Raja Grafindo : Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. 2005. Gadjra Mada University Press : Yogyakarta.
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*. 2012. PT Rajagrafindo Persada : Depok.
- Nirwono Joga, *Gerakan Kota Hijau*. 2013. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (kota) Hijau*. 2011. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. 2005. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Robert J. Kodoatie, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. 2005. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. 2010. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*. 2005. Sinar Grafika : Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. 2013. Alfabeta : Bandung
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*. 2014. Penerbit Arus Timur : Makassar

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Sistem Pembangunan Nasional

PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman RTRW Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba

Dari Website

<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/01/tata-perundang-undangan-hukum-di-indonesia-556346.html> diakses pada tanggal 4 Februari 2014

<http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/2013/09/bulukumba-rawan-bencana-masyarakat.html> di akses pada tanggal 7 Februari 2014

[http:// www.rca-fn.com/2013/01/lima-kecamatan-di-bulukumba-dilanda.html](http://www.rca-fn.com/2013/01/lima-kecamatan-di-bulukumba-dilanda.html).
di akses pada tanggal 15 Februari 2014